

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Pada bagian ini, peneliti akan menyajikan beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian *Strategi Transnational Advocacy Network Extinction Rebellion dalam mengatasi polusi udara di Jakarta*. Selain itu, peneliti memberikan referensi ke penelitian sebelumnya, serta kerangka konseptual, hipotesis, dan kerangka pemikiran.

Artikel ilmiah pertama berjudul, *Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Dalam Menangani Isu Ekologi di Indonesia: Studi Kasus Riau Tahun 2011–2018* (Gresika Novaradila, n.d.), Artikel ilmiah ini membahas cara jaringan advokasi global Greenpeace menangani deforestasi dan masalah ekologi di Indonesia, khususnya di Riau dari tahun 2011 hingga 2018. Konsep transnational advocacy networks oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink digunakan dalam penelitian ini, yang dilakukan melalui metode deskriptif dan analisis data kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa Greenpeace telah memanfaatkan empat strategi jaringan advokasi transnasional informasi, simbolisme, pengaruh, dan akuntabilitas. Dengan strategi-strategi tersebut, Greenpeace berhasil mendorong pemerintah untuk menghentikan izin perkebunan sawit, Hutan Tanaman Industri, dan pertambangan pada tahun 2018. Ini menunjukkan bagaimana jaringan advokasi transnasional sangat penting dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah dan menangani masalah lingkungan penting bagi negara (Gresika Novaradila, n.d.).

Meskipun keduanya berfokus pada masalah lingkungan, fokus kedua penelitian berbeda. Penelitian *Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Dalam Menangani Isu Ekologi di Indonesia: Studi Kasus Riau Tahun 2011–2018* lebih berkonsentrasi pada mendorong kebijakan deforestasi dan penerapan strategi internasional, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkonsentrasi pada mobilisasi masyarakat dan tindakan langsung untuk mengatasi

polusi udara. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Greenpeace dan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama ingin memberikan pemahaman yang signifikan tentang peran yang dimainkan oleh gerakan sosial dan organisasi non-pemerintah dalam mengatasi tantangan lingkungan yang mendesak.

Artikel ilmiah kedua berjudul, Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International karya (Arief Virgy et al., 2020). Penelitian ini menunjukkan bagaimana Greenpeace Indonesia memainkan peran strategis dalam menekankan Wilmar International tentang kebijakan deforestasi. Penelitian ini menganalisis strategi Greenpeace Indonesia untuk membentuk jaringan advokasi internasional untuk menekan dan mengawasi perilaku Wilmar International. Ini dilakukan dengan menggunakan teori Jaringan Advokasi Transnasional Keck & Sikkink. Hasilnya menunjukkan bahwa Greenpeace Indonesia dapat dengan sukses memanfaatkan strategi politik informasi dan pengaruh politik untuk mempengaruhi kebijakan Wilmar International. Namun, strategi Politik Symbolik memiliki kelemahan, yang membuat Greenpeace Indonesia kurang efektif dalam mencapai tujuan bersama dengan kelompok lingkungan lokal. Studi ini menekankan betapa pentingnya interaksi antara aktor non-negara dan organisasi regional di seluruh dunia. Selain itu, membangun kerja sama dengan NGO lingkungan lokal membutuhkan pendekatan inklusif dan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Rekomendasi penelitian termasuk penyebaran informasi yang tepat dan strategis pada waktu yang tepat, pengikatan aktor target dalam komitmen kebijakan melalui dokumen hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, dan peningkatan partisipasi dalam gerakan advokasi untuk meningkatkan tekanan pada aktor target dan meningkatkan dampak perubahan kebijakan. (Arief Virgy et al., 2020).

Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, keduanya sama-sama membahas isu lingkungan. Penelitian Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International lebih berkonsentrasi pada mendorong kebijakan deforestasi dan strategi global untuk mempengaruhi perusahaan besar, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih berkonsentrasi pada mobilisasi masyarakat dan tindakan langsung untuk mengatasi polusi udara. Kedua

penelitian memberikan pemahaman yang signifikan tentang peran yang dimainkan oleh gerakan sosial dan organisasi non-pemerintah dalam mengatasi tantangan lingkungan yang mendesak.

Artikel ilmiah ketiga berjudul, Manifestasi Gerakan Sosial Baru dalam Krisis Iklim Studi Kasus: Extinction Rebellion Indonesia (Natasha, 2022) Fenomena baru dalam kampanye krisis iklim di Indonesia adalah gerakan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pengalaman, perilaku, dan motivasi individu atau kelompok dalam gerakan sosial. Ini termasuk wawancara mendalam dan observasi partisipatif untuk memahami dinamika gerakan seperti Extinction Rebellion di Indonesia. Dengan struktur keanggotaan yang fleksibel dan dapat disesuaikan, XR Indonesia dapat lebih dekat dengan siapa saja berkat bentuk gerakan sosial baru yang terdesentralisasi. Metode nir-kekerasan menjadi dasar dari pergerakan XR. Namun, karena situasi yang berbeda, strategi XR Indonesia berbeda dengan strategi XR Pusat. XR Indonesia menggunakan strategi keterlibatan kritis, juga dikenal sebagai keterlibatan kritis. Meskipun XR Indonesia berusaha menghindari kooptasi, mereka masih memiliki kesempatan untuk bekerja sama dan berbicara secara terbuka tentang masalah krisis iklim. Oleh karena itu, strategi ini berfungsi sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap masalah yang diangkat. Berbeda dengan XR pusat, yang dapat langsung menggunakan strategi isolasi politik *low profile strategy*, XR pusat memiliki kesadaran masyarakat yang lebih besar dan taktik penangkapan massal dapat digunakan untuk mencapai tujuan utama mereka secara instan. (Natasha, 2022).

Meskipun keduanya berhubungan dengan Extinction Rebellion, masing-masing penelitian memiliki fokus yang berbeda. Khususnya, penelitian yang penulis teliti berkonsentrasi pada masalah polusi udara di Jakarta dan pendekatan yang digunakan untuk menangani masalah ini. Sementara itu, penelitian tentang fenomena gerakan sosial baru berfokus pada bagaimana XR berfungsi dalam konteks global krisis iklim dan metode non-kekerasan yang mereka gunakan untuk meningkatkan kesadaran publik. Penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu memberikan pemahaman yang signifikan tentang peran gerakan sosial dalam menangani masalah lingkungan yang mendesak.

Artikel ilmiah keempat berjudul, Strategi NGO Lingkungan Dalam Menangani Polusi Udara di Jakarta (Greenpeace Indonesia) karya (Ruhiat et al., 2019) Artikel ilmiah tersebut menjelaskan bagaimana Greenpeace menangani polusi udara di Jakarta dan strategi apa yang mereka gunakan. Penulis mengumpulkan dan menganalisis data tentang fenomena ini melalui studi pustaka yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa Greenpeace telah aktif menggunakan strategi penelitian dan kampanye publik untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. Greenpeace bekerja sama dengan organisasi lain untuk menyelidiki dampak penggunaan batubara pada udara dan kualitas udara. Mereka juga melakukan aksi langsung seperti kampanye di depan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pemasangan billboard dengan pesan-pesan kreatif. Dengan demikian, Greenpeace telah berhasil mengaplikasikan strategi-strategi yang merujuk pada konsep McCormick, yaitu strategi penelitian dan kampanye publik, dalam upaya penyelamatan lingkungan dan penanggulangan polusi udara di Jakarta. (Ruhiat et al., 2019a).

Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada isu yang dibahas yaitu polusi udara di Jakarta, akan tetapi fokus kedua penelitian berbeda. Penelitian yang akan ditulis oleh peneliti lebih menekankan pada mobilisasi masyarakat melalui aksi langsung untuk mengatasi masalah polusi udara, sedangkan penelitian dengan judul Strategi NGO Lingkungan Dalam Menangani Polusi Udara di Jakarta (Greenpeace Indonesia) lebih menekankan pada strategi advokasi formal yang digunakan oleh organisasi non-pemerintah dalam menghadapi tantangan polusi udara. Kedua penelitian memberikan wawasan penting tentang peran penting gerakan sosial dan organisasi non-pemerintah dalam menangani masalah lingkungan yang mendesak.

Artikel ilmiah kelima berjudul, Jaringan Advokasi Transnasional: Strategi Greenpeace dalam Menolak Rencana Pengeboran Shell di Kutub Utara Tahun 2012-2015 karya (Albertus, 2021). Artikel ilmiah tersebut menjelaskan taktik Greenpeace untuk mempengaruhi kebijakan Shell terkait rencana pengeboran lepas pantai di Kutub Utara. Setelah sekitar tiga tahun melakukan advokasi, kebijakan ini dihentikan. Penulis melihat bagaimana Greenpeace mencapai tujuan advokasinya

dengan menggunakan politik informasi, simbolik, politik pengaruh, dan akuntabilitas. Mereka melakukan ini dengan menggunakan kerangka pemikiran jaringan advokasi transnasional (TAN). Penelitian menunjukkan bahwa Greenpeace dapat mempengaruhi kebijakan Shell dengan setiap taktik dalam strategi TAN, terutama politik informasi dan simbolik. Selain itu, Greenpeace menggunakan politik pengaruh dan tanggung jawab untuk mempengaruhi Shell, terutama dengan mengawasi stakeholder Shell seperti LEGO. Kesimpulan artikel menunjukkan bahwa NGO dapat memengaruhi kebijakan korporasi global dengan efektif dengan strategi TAN, menegaskan peran penting NGO dalam hubungan internasional sebagai aktor yang dapat mempengaruhi kebijakan negara dan korporasi. Kesimpulan ini juga memperkuat gagasan bahwa NGO dapat menggunakan strategi TAN untuk melawan korporasi dan bukan hanya negara, dan menunjukkan bahwa NGO telah menjadi aktor yang tidak lagi marginal dalam hubungan internasional, tetapi memiliki peran yang lebih besar. (Albertus, 2021)

Meskipun keduanya berfokus pada masalah lingkungan, fokus kedua penelitian berbeda. Penelitian yang akan ditulis oleh peneliti lebih fokus pada mobilisasi masyarakat melalui tindakan langsung untuk mengatasi polusi udara Jakarta. Untuk saat ini, fokus penelitian Greenpeace adalah strategi advokasi internasional untuk menghentikan rencana pengeboran minyak Shell di Kutub Utara. Persamaan kedua penelitian memberikan gambaran yang sangat baik tentang bagaimana gerakan sosial dan organisasi non-pemerintah dapat berkontribusi pada penanganan tantangan lingkungan yang mendesak.

Artikel ilmiah keenam berjudul, Jaringan Advokasi Transnasional dalam Upaya Pelestarian Kawasan Arktik Dari Eksplorasi Minyak di Norwegia Tahun 2016 – 2018 karya (Triarda & Azura, 2024). Penelitian ini menyelidiki upaya Nature and Youth (Natur og Ungdom) dan Greenpeace Nordic untuk membentuk gerakan *The People vs. Arctic Oil* untuk menentang rencana eksplorasi minyak Norwegia di wilayah Arktik. Penelitian ini menggunakan gagasan Keck dan Sikkink tentang *Transnational Advocacy Networks* (TAN) untuk menjelaskan strategi yang digunakan oleh jaringan advokasi ini untuk mencapai tujuannya. Penelitian ini menganalisis empat strategi politik TAN informasi politik, politik simbolik, politik kekuatan, dan politik tanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa

jaringan advokasi tersebut menarik perhatian internasional dan berdampak pada kebijakan Norwegia terkait eksplorasi minyak di Arktik. Upaya ini telah membuat pemerintah bertindak, meskipun belum sepenuhnya berhasil. Ini menunjukkan kekuatan transnasional yang memperjuangkan prinsip lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini menjelaskan bagaimana advokasi transnasional dapat memengaruhi kebijakan negara dan menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi global dalam memperjuangkan masalah lingkungan (Triarda & Azura, 2024).

Persamaan dan perbedaan kedua penelitian ini yaitu keduanya sama-sama membahas lingkungan. Penelitian tentang Extinction Rebellion lebih fokus pada mobilisasi masyarakat melalui tindakan langsung untuk mengatasi polusi udara Jakarta. Sementara itu, penelitian tentang pelestarian kawasan Arktik berfokus pada penggunaan strategi advokasi transnasional untuk menghentikan eksplorasi minyak di Norwegia. Kedua penelitian memberikan pemahaman yang signifikan tentang peran yang dimainkan oleh gerakan sosial dan organisasi non-pemerintah dalam mengatasi tantangan lingkungan yang mendesak.

Artikel ilmiah ketujuh berjudul, Gerakan Transnasional dan Kebijakan: Strategi Advokasi Greenpeace *Detox Campaign on Fashion* di Tiongkok (Parameswari & Si, n.d.). Studi ini menekankan betapa pentingnya organisasi non-pemerintah (NGO), terutama Greenpeace, untuk mengubah kebijakan dan tindakan aktor lain dengan menggunakan strategi kampanye advokasi. Studi ini menemukan empat strategi utama yang digunakan oleh Greenpeace: informasi, pengaruh, simbolis, dan akuntabilitas. Mereka difokuskan pada Kampanye *Detox on Fashion* di Tiongkok antara 2011 dan 2013. Penelitian menunjukkan bahwa kampanye ini berhasil memengaruhi perilaku dan kebijakan aktor yang dituju di Tiongkok tentang masalah pencemaran air. Beberapa faktor mendukung keberhasilan kampanye ini, seperti reputasi Greenpeace sebagai organisasi non-pemerintah, jejaring yang luas, kekuatan advokasi, dan pemanfaatan media yang efektif. Meskipun kampanye ini mendapat dukungan dan komitmen dari sektor bisnis di seluruh dunia, efeknya terhadap kebijakan Tiongkok masih belum jelas. Singkatnya, strategi yang digunakan oleh Greenpeace untuk mendukung Kampanye *Detox on Fashion* telah berhasil mempengaruhi beberapa pihak target, tetapi dampaknya terhadap negara masih perlu dipertimbangkan dan dipelajari lebih lanjut (Parameswari & Si, n.d.).

Meskipun keduanya berfokus pada masalah lingkungan, fokus kedua penelitian berbeda. Penelitian yang akan ditulis oleh peneliti lebih fokus pada mobilisasi masyarakat melalui tindakan langsung untuk mengatasi polusi udara Jakarta. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh kampanye Detox Greenpeace berfokus pada penggunaan strategi advokasi global untuk menghentikan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam industri tekstil Tiongkok. Keduanya memberikan pemahaman yang signifikan tentang peran yang dimainkan oleh gerakan sosial dan organisasi non-pemerintah dalam mengatasi tantangan lingkungan yang mendesak.

Artikel ilmiah kedelapan berjudul, Pengaruh Jaringan Advokasi Greenpeace terhadap CIMB International dalam Isu Pendanaan PLTU Batu Bara di Indonesia karya (Ilmanuarif Shafar & Isnaeni, n.d.). Dalam penelitian ini, penciptaan *Transnational Advocacy Network* (TAN) oleh Greenpeace dan sejumlah organisasi non-pemerintah Indonesia dimaksudkan untuk memengaruhi kebijakan pembiayaan Bank CIMB, yang pada akhirnya menghasilkan keputusan CIMB untuk menghentikan pembiayaan berbasis batu bara mulai tahun 2021. Penelitian ini menemukan bahwa strategi advokasi TAN Greenpeace, terutama melalui politik informasi dan akuntabilitas, berhasil mempengaruhi kebijakan CIMB. Ini terjadi meskipun kampanye TAN Greenpeace dilakukan di luar proses pengambilan keputusan target, tetapi akhirnya membawa dukungan publik dan pembicara dari *Cooler Earth Sustainability Summit* untuk mendorong CIMB untuk menghentikan pendanaan proyek batu bara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *civil society* terus memainkan peran penting dalam mendukung aktor swasta atau bisnis, dalam bentuk koalisi NGO. Namun, menurut konsep McCormick, advokasi dari luar proses pengambilan keputusan target cenderung berpengaruh sedikit. Salah satu tujuan dari artikel ini adalah untuk melakukan penelitian tambahan tentang perbandingan kampanye organisasi non-pemerintah (NGO) yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan yang terlibat di luar proses tersebut. Serta mengenai penerapan standar internasional seperti CCCA untuk mendorong partisipasi pihak swasta dalam pengurangan dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, artikel ini memberikan pemahaman yang penting tentang fungsi organisasi non-pemerintah (NGO) dalam mempengaruhi kebijakan aktor swasta terkait masalah

lingkungan. Selain itu, itu juga memberikan arahan untuk penelitian tambahan yang relevan (Ilmanuarif Shafar & Isnaeni, n.d.).

Meskipun keduanya berfokus pada masalah lingkungan, fokus kedua penelitian berbeda. Studi tentang Extinction Rebellion lebih fokus pada mobilisasi masyarakat melalui tindakan langsung untuk mengatasi polusi udara Jakarta. Studi yang dilakukan Greenpeace terhadap CIMB lebih fokus pada penggunaan strategi advokasi internasional untuk mencegah lembaga keuangan mendukung proyek batu bara. Kedua penelitian memberikan pemahaman yang signifikan tentang peran yang dimainkan oleh gerakan sosial dan organisasi non-pemerintah dalam mengatasi tantangan lingkungan yang mendesak.

Artikel ilmiah terakhir berjudul, *Extinction Rebellion: Green activism and the fantasy of leaderlessness in a decentralized movement* karya (Fotaki & Foroughi, 2022). Dengan menggunakan Extinction Rebellion (XR) sebagai studi kasus, penelitian ini menyelidiki konsep kepemimpinan dalam organisasi yang terdesentralisasi. Melalui pengamatan yang cermat terhadap gerakan lingkungan ini, mempertanyakan konsep organisasi tanpa pemimpin dan mempertanyakan apakah konsep dan “organisasi terdesentralisasi” yang tidak terpengaruh oleh otoritas adalah upaya yang fantastis. Penelitian ini membahas keterlibatan XR dalam tata kelola global dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui penelitian pustaka. Pendekatan ini membantu menjelaskan partisipasi XR dalam diskusi internasional tentang perubahan iklim serta bagaimana gerakan ini berfungsi sebagai bentuk perlawanan terhadap Penelitian membahas gagasan tentang organisasi “tanpa pemimpin” yang diadopsi oleh banyak gerakan sosial baru-baru ini, termasuk XR. Mereka mengakui bahwa, dengan mengandalkan mobilisasi yang spontan dan terdesentralisasi, media sosial telah mengubah cara gerakan sosial sosial diorganisasikan. Terlepas dari itu, fokus penelitian ini adalah bagaimana gerakan sosial yang terdesentralisasi menggunakan dan mengingkari kekuasaan. Kami percaya ini terkait dengan ide bahwa tidak ada pemimpin yang benar-benar ada, yang dapat mengambil alih organisasi dan menjadi tujuan itu sendiri. Penelitian ini menemukan bahwa ini dapat menghalangi evaluasi ulang yang lebih menyeluruh terhadap cita-cita organisasi tanpa pemimpin

serta penerapan praktik inklusif yang inklusif dalam organisasi dan memimpin gerakan (Fotaki & Foroughi, 2022).

Meskipun keduanya berhubungan dengan Extinction Rebellion, masing-masing penelitian memiliki fokus yang berbeda. Mobilisasi masyarakat melalui aksi langsung untuk mengatasi polusi udara di Jakarta adalah fokus penelitian tentang polusi udara. Namun, penelitian berjudul *Extinction Rebellion: Green activism and the fantasy of leaderlessness in a decentralized movement* berfokus pada struktur organisasi XR dan bagaimana desentralisasi mempengaruhi kinerja gerakan. Persamaan kedua penelitiannya adalah menunjukkan peran organisasi non-pemerintah dan dinamika sosial dalam menangani masalah lingkungan yang mendesak.

Tabel 2. 1 Literatur Review

| N0 | judul | penulis | metode | teori |
|-----------|---|--|---------------|---------------------------------------|
| 1 | Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Dalam Menangani Isu Ekologi di Indonesia: Studi Kasus Riau Tahun 2011–2018 | Gresika Novaradila, Ario Bimo Utomo | kualitatif | Jaringan Advokasi Transnasional |
| 2 | Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International | Muhammad Arief Virgy, Yusa Djuyandi, Wawan Budi Darmawan | kualitatif | Jaringan Advokasi Transnasional |
| 3 | Manifestasi Gerakan Sosial Baru dalam Krisis Iklim Studi Kasus:Extinction Rebellion Indonesia | Dina Natasha | kualitatif | Gerakan Sosial Baru |
| 4 | Strategi NGO Lingkungan Dalam Menangani Polusi Udara di Jakarta (Greenpeace Indonesia) | Fariz Ruhiat, Dudy Heryadi, Akim | kualitatif | NGO Strategy |
| 5 | Jaringan Advokasi Transnasional: Strategi Greenpeace dalam Menolak Rencana Pengeboran Shell di Kutub Utara Tahun 2012-2015 | Yanuar Albertus | kualitatif | Jaringan Advokasi Transnasional |
| 6 | Jaringan Advokasi Transnasional dalam Upaya Pelestarian Kawasan Arktik | Meidinda Putri Azura, Reza Triarda | kualitatif | Jaringan Advokasi Transnasional |

| | | | | |
|---|---|---|------------|---------------------------------|
| | Dari Eksplorasi Minyak di Norwegia Tahun 2016 – 2018 | | | |
| 7 | Gerakan Transnasional dan Kebijakan: Strategi Advokasi Greenpeace <i>Detox Campaign on Fashion</i> di Tiongkok | Puti Parameswari, M.Si | kualitatif | Jaringan Advokasi Transnasional |
| 8 | Pengaruh Jaringan Advokasi Greenpeace terhadap CIMB International dalam Isu Pendanaan PLTU Batu Bara di Indonesia | Wildan Ilmanuarif Shafar, Nurul Isnaeni | kualitatif | Jaringan Advokasi Transnasional |
| 9 | <i>Extinction Rebellion: Green activism and the fantasy of leaderlessness in a decentralized movement</i> | Marianna Fotaki, Hamid Foroughi | kualitatif | Environmental Movement |

Sumber : Penulis

Berdasarkan dari sembilan tinjauan literatur memberikan penulis pemahaman tentang jaringan advokasi transnasional memainkan peran penting dalam penanggulangan masalah global seperti polusi udara, yang dapat menyebar lintas negara. Extinction Rebellion adalah contoh utama gerakan yang menggunakan jaringan global untuk meningkatkan kesadaran akan polusi udara dan perubahan iklim, yang mengancam kelangsungan hidup manusia dan ekosistem. Dengan pendekatan berbasis aksi langsung dan pendekatan non-kekerasan, Extinction Rebellion telah mengembangkan jaringan advokasi global yang melibatkan berbagai kelompok di seluruh dunia. Polusi udara adalah masalah lingkungan yang mendalam dan meluas yang membutuhkan respons global yang terkoordinasi, dan jaringan advokasi ini memungkinkan pertukaran informasi, koordinasi aksi, dan mobilisasi massa secara luas. Dengan bantuan jaringan ini, XR telah menciptakan platform untuk kerja sama internasional.

Selain itu, penelitian ini menekankan bahwa kerja sama antara berbagai pihak, termasuk LSM, pemerintah, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan perubahan kebijakan polusi udara yang efektif. Jaringan advokasi internasional telah terbukti mampu menantang struktur kekuasaan dan meningkatkan kesadaran global tentang efek buruk polusi udara terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, seperti yang dilakukan oleh Extinction Rebellion.

2.2 Kerangka Teoritis

Untuk mempermudah dan mendukung analisis dan argumen penelitian ini, peneliti mengadopsi beberapa teori dan konsep dari pakar berpengalaman. Beberapa teori dan konsep tersebut meliputi:

2.2.1 *Transnational Advocacy Network*

Buku "*Activist Beyond Border: Advocacy Networks in Internasional Politics*" yang diterbitkan pada tahun 1998 menjadi fenomena baru dalam bidang studi hubungan internasional dan politik. Dua penulis terkenal Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink bertanggung jawab atas karya besar ini. Mereka membuka lapangan untuk aktor non-negara seperti aktivis dan organisasi non-pemerintah yang menjadi pahlawan di arena politik internasional. Keck dan Sikkink dengan cermat menggambarkan bagaimana Jaringan Advokasi Transnasional sangat memengaruhi tatanan politik internasional. Istilah "jaringan transnasional" bukan semata-mata untuk menggambarkan koalisi itu juga menunjukkan bagaimana agen-agen bertindak dan membentuk politik baru, dengan memperluas gagasan jaringan dari ranah sosiologi ke dunia internasional, perbedaan antara ranah nasional dan internasional dapat diatasi. Namun, perlu diperhatikan bahwa penggunaan istilah "jaringan transnasional" bukanlah hasil dari teori ilmu sosial sebaliknya, para aktor telah sengaja membentuk dan memberi nama jaringan transnasional selama dua dekade terakhir. Seolah-olah sudah terlambat untuk mengakui peran penting yang dimainkan oleh jaringan aktivis dalam dunia politik. (Keck & Sikkink, 1998)

Jaringan advokasi global berusaha mempengaruhi kebijakan dengan cara yang mirip dengan gerakan sosial atau kelompok politik. Mereka tidak memiliki kekuatan dalam arti konvensional, jadi mereka harus menggunakan kekuatan

informasi, ide, dan taktik mereka untuk mengubah konteks informasi dan nilai yang membentuk kebijakan negara. Jaringan ini sebagian besar melakukan persuasi atau sosialisasi, tetapi kedua proses ini tidak terlepas dari konflik. Persuasi dan sosialisasi seringkali melibatkan tekanan, memaksa, sanksi, dan mengecam lawan. Dalam upaya persuasi, sosialisasi, dan tekanan jaringan advokasi transnasional menggunakan jaringan dengan berbagai politik, seperti politik informasi, politik simbolik, politik pengaruh, dan politik pertanggungjawaban, ada saat-saat ketika sebuah kampanye menggabungkan banyak elemen ini sekaligus. Para aktivis jaringan secara aktif mencari cara untuk membawa masalah ke agenda publik. Mereka melakukannya dengan cara yang kreatif dan menemukan tempat yang ramah. Mereka juga menciptakan masalah dengan menggabungkan masalah lama dengan cara baru. Kemampuan mereka untuk merangkai cerita dan mengelola informasi sangat penting untuk sebagian besar upaya ini. (Keck & Sikkink, 1998)

Pemanfaatan informasi baik informasi teknis maupun kesaksian manusia untuk menciptakan pengaruh dan menggerakkan tindakan adalah bagian penting dari strategi politik jaringan. Pendapat publik dan para pengambil keputusan sangat dipengaruhi oleh informasi dan kesaksian ini. Selain itu, mereka aktif mencari cara baru untuk membawa isu-isu ke perhatian publik, seperti mencari tempat yang mendukung dan mengemasnya dengan cara yang kreatif. Untuk menyelesaikan masalah mereka dan meningkatkan kesadaran publik, mereka menggunakan simbol dan peristiwa simbolis. Ketika jaringan perlu memberikan tekanan dan mempengaruhi aktor yang lebih kuat untuk mengubah kebijakan, *leverage politic* menjadi penting. Ini termasuk menemukan sumber daya yang dapat digunakan untuk tawar-menawar dalam kampanye jaringan. Sumber daya dapat material seperti barang, uang, atau moral, seperti dukungan publik atau reputasi. Akhirnya, politik pertanggungjawaban adalah upaya jaringan untuk memaksa pemerintah dan pihak lain untuk secara terbuka mengubah pendapat mereka tentang masalah tertentu dan membuat mereka bertanggung jawab atas janji dan prinsip yang mereka buat di depan umum. Jaringan berusaha untuk memastikan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut memberikan kesempatan untuk memaksa perubahan dan memeriksa apakah tindakan dan kata-kata sesuai satu sama lain. (Keck & Sikkink, 1998)

Dengan demikian *Transnational Advocacy Network* menunjukkan bagaimana jaringan advokasi transnasional dapat menggabungkan kekuatan lokal dan internasional untuk menangani masalah lingkungan seperti polusi udara di Jakarta. Dengan menggunakan pendekatan desentralisasi, aksi langsung non-kekerasan, dan kolaborasi lintas negara, XR dapat meningkatkan tekanan terhadap pengambil kebijakan dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih responsif terhadap polusi udara dan krisis iklim.

2.2.2 Non Governmental Organization

Pada dasarnya, hubungan internasional mempelajari perilaku internasional, termasuk peran aktor negara (*state actors*) dan non-negara (*non-state actors*) dalam hubungan internasional. Organisasi internasional adalah jenis kerja sama yang terjadi di luar batas negara dengan struktur organisasi yang jelas dan lengkap. Organisasi ini diharapkan dapat beroperasi secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama, baik antar pemerintah dan kelompok nonpemerintah maupun antara pemerintah sendiri. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau *non-governmental organization* (NGO) merupakan organisasi yang independen, tidak berorientasi pada keuntungan, dan bergerak dalam berbagai masalah sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan. Buku "NGOs, the UN and Global Governance" yang diterbitkan tahun 1996 menjadi pedoman Hubungan Internasional memberikan perhatian terhadap peran penting aktor non-governmental organization (NGO) dan masyarakat sipil global (Global Civil Society). Menurut Thomas Weiss dan Leon Gordenker, non-pemerintah (NGO) memainkan peran penting dalam sistem internasional dengan menyediakan informasi, melakukan advokasi, dan membangun hubungan antara masyarakat sipil dan negara (Weiss & Gordenker, 1996).

Sebagian besar dana organisasi non-pemerintah (NGO) berasal dari sumbangan masyarakat, *grant*, dan sumber pendanaan lainnya. Sebagian besar staf NGO terdiri dari pekerja profesional yang dibayar atau *volunteer*. NGO dapat melakukan berbagai hal, seperti menawarkan bantuan dan relawan kepada wilayah yang terkena bencana, mendukung hak asasi manusia dan keadilan sosial, dan

mendukung konservasi lingkungan, juga dapat bekerja pada skala lokal, nasional, atau global. NGO sangat penting untuk memenuhi kekurangan pemerintah dan lembaga publik lainnya dalam menangani masalah sosial dan lingkungan. Untuk membawa perubahan positif, mereka sering bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat, dan organisasi lain. Terlepas dari statusnya sebagai non-profit, organisasi non-pemerintah (NGO) tetap bertanggung jawab atas operasi mereka dan tetap transparan secara keuangan melalui laporan dan audit rutin. PBB mendefinisikan non-pemerintah (NGO) sebagai kelompok warga yang bekerja secara sukarela untuk mendukung kepentingan umum tanpa mencari keuntungan pribadi (Harahap, n.d.)

Jenis organisasi non-pemerintah (NGO) dapat dikategorikan berdasarkan lingkup operasinya. Berbasis Komunitas (*Community Based Organizations*) adalah organisasi yang tumbuh dari komunitas lokal dan berfokus pada masalah sosial setempat. Organisasi lingkup kota (*Citywide Organizations*) memberikan layanan sosial kepada masyarakat kota. Organisasi lingkup nasional (National NGO) beroperasi di tingkat nasional dan sering memiliki cabang di berbagai wilayah. Organisasi lingkup internasional (*International NGO/INGOs*) beroperasi di banyak negara dan biasanya memiliki kantor pusat di negara maju (Kajian et al., n.d.).

Menurut Lewis dan Kanzi, organisasi non-pemerintah (NGO) menjalankan tiga fungsi utama yaitu pembangunan dan advokasi. Pertama, *Implementers* (pelaksana) memberikan barang dan jasa kepada masyarakat secara langsung, ini termasuk bantuan kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Kedua, *Catalyst* (katalisator) mendorong perubahan sosial melalui kampanye, advokasi, dan inovasi. Ketiga, *Partners* (Mitra) bekerja sama dengan donor, pemerintah, dan sektor swasta untuk menerapkan program pembangunan dan advokasi (Weiss & Gordenker, 1996)

Dengan berbagai fungsi sebagai pelayanan jasa dan kemanusiaan, NGO bertujuan pada kepentingan bersama dalam masalah tertentu. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian masyarakat kepada pemerintah, terutama dalam hal mendukung dan mengawasi kebijakan, dan mendorong partisipasi politik melalui informasi yang mereka miliki. INGOs pada dasarnya merupakan solusi berbasis

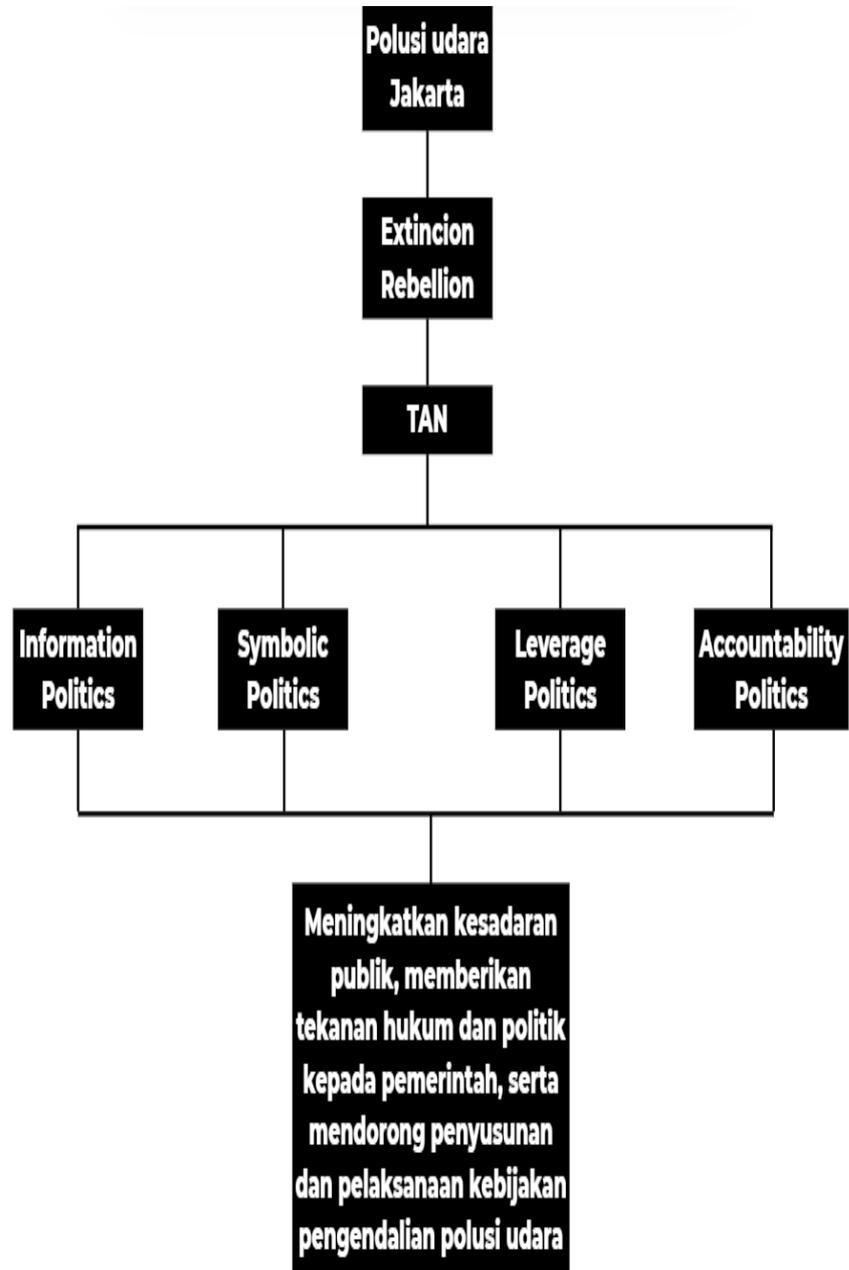
pasar untuk masalah politik oleh karena itu, mereka dapat dianggap sebagai sarana progresif untuk perubahan dalam pengelolaan sistem politik dan sosial yang ada saat ini. Organisasi non-pemerintah (NGO) beroperasi dengan merancang dan menerapkan program aksi konkret yang secara langsung mengubah kondisi orang, artefak budaya, atau lingkungan alam. Tujuan dari advokasi NGO adalah untuk mempengaruhi pendapat, kebijakan, dan praktik pemerintah, kelompok sosial, perusahaan, dan masyarakat umum secara keseluruhan. Mereka tidak dapat mengubah kondisi realitas secara langsung, tetapi mereka dapat melakukannya dengan mempengaruhi perantaranya (Ruhiat et al., 2019).

2.3 Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Ada banyak cara untuk menjelaskan asumsi, seperti etimologis, teknis, statistik, dan sebagainya. Peneliti berasumsi, yang bertujuan untuk menggunakan asumsi ini sebagai referensi saat membuat kesimpulan penelitian. Oleh karena itu, peneliti membuat asumsi berikut: *Extincion Rebellion bertujuan untuk merumuskan dan menerapkan strategi Jaringan Advokasi Transnasional yang berfokus pada pengungkapan dan pemahaman masyarakat umum tentang cara mengatasi polusi udara. Mereka berharap informasi ini akan mendorong pemerintah untuk mengubah, mengevaluasi, atau bahkan menghentikan kebijakan tersebut dan mendorong solusi berkelanjutan untuk meningkatkan kondisi lingkungan.*

2.4 Kerangka Analisis

Gambar 2. 1 Kerangka Analisis



Sumber : Penulis